

# Peran Alumni Sebagai *Public Private Partnership* Dunia Pendidikan

Nur Aini Susanti<sup>1</sup>, Muchlas Samani<sup>2</sup>

S3 Pendidikan Vokasi, Universitas Negeri Surabaya<sup>1</sup>  
nursusanti@unesa.ac.id  
Pasca Sarjana, Universitas Negeri Surabaya<sup>2</sup>

## Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin maju pendidikan maka semakin maju pula suatu negara. Melalui pendidikan masyarakat memperoleh pengetahuan dan kompetensi sebagai bekal bekerja di industri. Pendidikan harus selaras dengan kemajuan teknologi serta berorientasi pada dunia kerja yang menghasilkan lulusan yang berkompoten sesuai kebutuhan dunia industri. Lulusan atau alumni merupakan produk yang telah melewati proses panjang pembelajaran. Lembaga pendidikan tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya kemitraan yang sinergi antara pemerintah, industri dan alumni. Alumni sebagai sasaran mutu pendidikan, merupakan media evaluasi pembelajaran, sebagai tolak ukur kualitas dari lembaga pendidikan dan sebagai *public private partnership* pendidikan. Alumni diharapkan memberikan informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan dunia industri sehingga mampu menjembatani industri dan dunia pendidikan. Alumni merupakan informan tentang kebutuhan industri merupakan tujuan utama pendidikan vokasi. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa arti alumni sebagai *public private partnership* pada dunia pendidikan? 2) Bagaimana peran alumni sebagai *public private partnership* pada pendidikan vokasi? Penelitian ini merupakan kajian literatur menggunakan analisis deskriptif. Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1) untuk mengetahui arti alumni sebagai *public private partnership* pada dunia pendidikan. 2) untuk mengetahui peran alumni sebagai *public private partnership* pada pendidikan vokasi.

Kata Kunci: *public private partnership*, pendidikan vokasi, kompetensi, alumni, industri.

## 1. Pendahuluan

Semakin maju pendidikan suatu negara, semakin maju pula negara tersebut. Pendidikan harus selaras dengan kemajuan teknologi serta berorientasi pada dunia kerja yang menghasilkan lulusan yang berkompoten. Alumni sebagai sasaran mutu pendidikan merupakan media evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur kualitas lembaga pendidikan. Alumni mampu menjembatani dunia industri dengan dunia pendidikan.

Bailey dan Dolan (2011) mengatakan bahwa istilah kemitraan berawal dari kerjasama pembangunan atau *development co-operation* saat perangdingin, dekolonisasi dan proses globalisasi. Istilah kemitraan dalam laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Organisasi untuk kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (1996), yang berjudul *Shaping the 2<sup>st</sup> Century: The Contribution of Development Co-*

*operation* (membentuk abad 21: Kontribusi Kerjasama Pembangunan) yang mendefinisikan *partnership* sebagai kemitraan antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang berdasar pada perestujuan yang menggambarkan tanggung jawab bersama atas kepentingan bersama.

Dalam buku *Guide to Partnership Building* dijelaskan bahwa ada 3 hal penting dalam kemitraan yaitu: (1) *equality/kesetaraan*, (2) *transparency/transparansi* dan (3) *mutual benefits/keuntungan* bersama. Kerjasama atau kemitraan yang kolaboratif memiliki ciri antara lain: (1) menciptakan program bersama-sama, (2) mitra membawa sumber daya untuk solusi, (3) diskusi antar mitra selalu dengan alternatif yang bisa diadaptasi sesuai masyarakat lokal atau peristiwa yang terjadi, (4) mitra mengedepankan transparansi dan (5) kemitraan bersifat mendalam, tidak hanya persetujuan kontrak.

Wanni (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003) menekankan bahwa kemitraan memiliki prinsip inti yaitu: *Reciprocity* (berbalasan), *Accountability* (Akuntabel/tanggung gugat), *Join decision making* (pembuatan keputusan bersama), *respect* (penghormatan), *trust* (kepercayaan), *transparancy* (transparansi), *suistanability* (keberlanjutan), *mutual interest* (kepentingan bersama).

Muhson. A, Wahyuni. D, Supriyanto dan Mulyani. E (2012) dalam *Analisis Relevansi lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja* menyatakan bahwa jenis pekerjaan pertama lulusan yang paling dominan adalah guru, pegawai swasta dan guru negeri. Tingkat relevansi dilihat dari jenis pekerjaan termasuk kategori cukup karena separo lebih lulusan bekerja di bidang pendidikan.

Menurut (Education International, 2009) dalam Okeye. KRE, Chijioke. OP. (2013). *Private-Public Partnership And Technical Vocational Education And Training (TVET) In A Developing Economy* mengatakan:

*“The private provider (e.g.s individual, civil groups, organization) and public provider (e.g.s government, community people, agencies) can partner to or jointly provide services such as education to the people. This mutual agreement to jointly provide service to people on established terms is referred to as private public partnerships (PPP). PPP is viewed as a generic term for the relationships formed between the private sector and public bodies often with the aim of introducing private sector resources and/or expertise in order to help provide and deliver public sector assets and service.*

Permasalahan antara lain: 1) Apa arti alumni sebagai public private partnership pada dunia pendidikan? 2) Bagaimana peran alumni sebagai public private partnership pada pendidikan vokasi? Makalah ini merupakan kajian literatur menggunakan analisis deskriptif. Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1) untuk mengetahui arti alumni sebagai *public private partnership* pada dunia pendidikan. 2) untuk mengetahui peran alumni sebagai *public private partnership* pada pendidikan vokasi.

## 2. Metode

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini praktis dan dapat mengungkapkan kompleksitas yang mendalam suatu kejadian atau suatu kebijakan. Makalah ini mendeskripsikan peran alumni pada dunia pendidikan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari literatur yang berkaitan dengan lulusan sekolah dan perguruan tinggi sebagai *public private partnership*. Prosedur analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peran Alumni pada Dunia Pendidikan

Alumni merupakan lulusan atau produk suatu proses pembelajaran. Alumni dalam hal ini bisa orangtua, pengusaha, pegawai, guru dll. Peran serta alumni merupakan keterlibatan yang nyata dalam suatu pendidikan. Peran tersebut bisa berupa memberikan gagasan, kritik membangun, kerjasama dan pelaksanaan pendidikan. Misal orangtua sebagai alumni merupakan partner lembaga pendidikan yang membentuk karakter peserta didik.

Hal tersebut senada dengan Anggraeni. ND, Yoto dan Basuki (2015) dalam *Studi Tentang Peran Serta Orang Tua dan Dunia Usaha*, menyatakan

bahwa diperlukan beberapa program untuk menjalin hubungan antara alumni dan sekolah, antara lain: 1) melibatkan orangtua secara proporsional, dan profesional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah; 2) menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik; 3) mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan, sekolah dan dewan pendidikan serta komite sekolah bagi orang tua peserta didik baru. Setelah itu dilakukan perkenalan dan orientasi singkat agar mereka mengetahui sekolah dengan berbagai program dan aktivitasnya; 4) mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, sehingga rapat dapat efektif dan orang tua dapat saling kenal; dan 5) mengirimkan berita tentang sekolah secara periodik, sehingga orang tua mengetahui program, dan perkembangan sekolah.

Alumni sebagai informan dapat menjembatani sekolah dan dunia usaha/dunia industri. Industri membutuhkan sumber daya yang terdidik, handal, yang mampu menjawab segala tantangan. Sekolah merupakan produk yang menghasilkan lulusan yang berkompeten. Industri memiliki peran membantu pelaksanaan praktik kerja industri, pelatihan guru, dan rekrutmen tenaga kerja baru.

Dikmenjur (1994:17) menyebutkan rangsangan dan motivasi bagi industri yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut: 1) perlakuan pajak penghasilan atas biaya latihan karyawan, pemagangan dan beasiswa, sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor 770/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990, dan Surat Edaran Dirjen Pajak, ref. Nomor SE-24/PJ.3.1/1990 tanggal 18 Juli 1990; 2) pemberian pengakuan dan penghargaan kepada industri/perusahaan pasangan SMK dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sistem ganda.

Penghargaan dan pengakuan dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang dirasakan mempunyai nilai atau makna bagi industri/perusahaan yang bersangkutan (Wena, 1996).

Menurut Dikmenjur (1994) naskah kerjasama antara sekolah dan industri pada dasarnya memuat: 1) tujuan pelaksanaan sistem ganda; 2) program pendidikan sistem ganda, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di sekolah dan di industri, serta model penyelenggaraannya; 3) jumlah peserta yang mengikuti pendidikan sistem ganda; 4) tanggung jawab masing-masing pihak penyelenggaraan pendidikan sistem ganda; 5) pelayanan pihak industri kepada peserta pendidikan sistem ganda; 6) administrasi penyelenggaraan pendidikan sistem ganda; dan 7) hal-hal lain yang dianggap perlu.

### 3.2 Alumni Sebagai *Public Private Partnership*

Bank Dunia mengatakan kemitraan adalah ciri utama dalam pembangunan. Kemitraan dalam pembangunan adalah kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah atau privat dikenal dengan nama *public private partnership (PPP)* yaitu kemitraan antara publik/pemerintah dan non pemerintah atau privat.

Lee (2006) mengatakan bahwa *PPP* adalah:

“ *A voluntary alliance between various equal actors form differen sectors whereby they agree to work together to reach a common goal or fulfil a spesific need that involves shared risks, responibilities, means and competencies (p.8).* ”

Bahwa *public private partnership* adalah aliansi suka rela antara aktor yang bermacam-macam dari

sektor yang berbeda dimana mereka setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan khusus yang melibatkan resiko, tanggung jawa, alat-alat dan kompetensi bersama. Dalam kemitraan ini aliansi atau kerjasama bersifat suka rela, dimana masing-masing pihak atau sektor setuju karena keinginannya sendiri untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama.

Tan, Allen & Overy (2012) dalam *Public Private Partnership* menjelaskan bahwa *public private partnership* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan program atau skema yang disponsori oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta untuk membiayai atau memfasilitasi pengadaan layanan bagi masyarakat atau pengadaan aset infrastruktur masyarakat. Publik dalam hal ini diartikan sebagai pemerintah. Dimana pemerintah memiliki kekuatan untuk memulai kemitraan dengan membuat inisiatif atau merancang program.

*Partnership British Columbia (2012)* dalam bukunya *An Introduction to Partnership* menjelaskan bahwa:

*“A public private partnership is a legally-binding contract between goverment and business for the provision of assets and the delivery of sevicees that allocates responsibilities and business risks among the various partners. In a P3 arrangement, government remains actively involved throughout the project’s life cycle.”*

*Public Private Partnership (PPP)* adalah kontrak antara pemerintah dan swasta untuk pengadaan aset dan layanan jasa yang

mengalokasikan tanggung jawab dan resiko bisnis diantara para mitra. Dalam *PPP* pemerintah terus terlibat selama proyek itu berlangsung.

Kartasasmita (1996) menuliskan bahwa, pemerintah harus memprakarsai kemitraan tersebut paling tidak untuk menciptakan iklim yang merangsang kemitraan antara lain dengan cara: a) mengembangkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang jelas, yang tercermin baik pada tujuan, arahan maupun indikator-indikator kebijaksanaan (*policy indicators*); b) menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat; c) memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan; d) mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada di berbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan seluas-luasnya dalam kemitraan pembangunan; e) menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang mencakup rencana investasi pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional. f) menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat menjadi acuan terutama bagi swasta dan masyarakat.

Dalam kemitraan *Public Private Partnership*, *private* diartikan sebagai pihak swasta, Petkoski, Jarvis dan Garza (2006) mengatakan:

*“Many of the traditional development actors in the public and civilsociety sectors now recognize the increasing difficulty of tackling certain global problems in a unilateral manner. There are occasions when the private sector, often in partnership with government,*

*civil society or both, or both, can be better positioned to provide solutions because of its resources (financial and in-kind), innovation and management skills”*

Bahwa banyak pelaku pembangunan tradisional dalam sektor pemerintah dan masyarakat sekarang mengakui kesulitan yang semakin meningkat dalam menangani masalah-masalah global dengan cara sepihak. Sering pihak swasta harus ditempatkan dalam bentuk *partnership* untuk memberikan solusi karena pihak swasta bisa menyediakan sumber-sumber seperti keuangan, inovasi dan ketrampilan manajemen.

Colverson dan Perera (2011) menjelaskan bahwa, *PPP* memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari *PPP* antara lain: 1) meningkatkan efisiensi, keahlian dan inovasi pihak swasta untuk berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan infrastruktur dan menghemat lebih banyak biaya dan waktu dalam fase konstruksi dan pelaksanaan, meningkatkan nilai uang proyek; 2) mendistribusikan/membagi resiko program dalam keuangan, waktu, perencanaan dan konsultasi masyarakat antara pemerintah dan privat; 3) meningkatkan investasi pihak swasta di infrastruktur milik pemerintah; 4) mengurangi resiko, menjamin kesempatan investasi jangka panjang pihak swasta; 5) menjamin modal swasta, menyediakan kesempatan investasi dan merangsang industri lokal dan pasar kerja.

Kelemahan *PPP* bagi pihak swasta antara lain: biaya bisa lebih mahal dan transparansi keuangan kurang bisa diakses, bisa terjadi monopoli oleh pihak swasta tertentu.

Latham (2009) dalam *Public Private Partnership in Education* mengatakan bahwa, *partnership* bukanlah privatisasi yang melibatkan transfer permanen akan kendali dari agen publik atau pemerintah ke pihak swasta. Menurutnya tujuan *partnership* adalah:

*“ 1) to promote improvements in the financing and provision of services from both the public and private sectors but not to increase the role of one over the other; and 2) to improve existing services provided by both sectors with an emphasis directed on system efficiency, effectiveness, quality, equity and accountability”*

Bahwa tujuan *partnership* adalah meningkatkan layanan keuangan dan ketersediaan jasa dari pemerintah dan sektor swasta tetapi bukan untuk meningkatkan peran salah satu terhadap yang lainnya dan untuk meningkatkan layanan yang sudah ada dari publik dan sektor swasta dengan penekanan pada sistem efisiensi, efektivitas, kualitas, kesetaraan dan akuntabilitas.

Kemitraan dalam pendidikan menurut Latham (2009), melibatkan 3 mitra yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dimana masing-masing mitra memiliki peran yang berbeda antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Mitra dalam Kemitraan PPP Bidang Pendidikan

Publik	Sektor Swasta	Masyarakat
Keuntungan yang diperoleh		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan untuk pembuat peraturan tanggung jawab untuk menjamin pendidikan sebagai hak azazi manusia</li> <li>- Keterlibatan jangka panjang</li> <li>- Akuntabel</li> <li>- Kemampuan menyebarluaskan ke banyak sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi dan produktifitas</li> <li>- Inovasi</li> <li>- Hasil fleksibel</li> <li>- Efektivitas pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jejaring dan pengalaman lokal</li> <li>- Berakar di masyarakat</li> <li>- Kemampuan untuk memonitor di tingkat akar rumput</li> </ul>
Kelemahan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Anggaran terbatas</li> <li>-Rresistan untuk berubah</li> <li>-Lambat dalam merespon</li> <li>-Model manajemen top down</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidak fokus pada barang publik</li> <li>-Kurang peduli dengan hal yang sulit dicapai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewakili kepentingan kelompok khusus atau tertentu</li> <li>- Kurang profesional</li> </ul>

Selanjutnya Latham (2009), mengelompokkan PPP dalam pendidikan menjadi 7 macam yaitu 1) adopsi program sekolah, 2) Filantropi sekolah swasta, 3) Program *Capacity Building*, 4) *Outsourcing* dalam manajemen sekolah, 5) program pembelian pemerintah, 6) program voucher dan 7) kemitraan infrastruktur sekolah.

Menurut Stainback (2000), PPP membantu pemerintah dalam pemenuhan fasilitas sekolah-sekolah negeri karena bisa menyediakan ahli di bidang pembangunan sehingga bisa efektif. Stainback menegaskan bahwa *partneship* antara pemerintah dan swasta di masing-masing daerah atau sekolah akan berbeda tergantung pada kondisi daerah antara lain: tantangan yang berbeda dan tujuan

yang dicapai misal membangun sekolah baru atau merenovasi, membangun fasilitas multiguna dll.

Menurut The science businnes (2012) dalam *Making Industry-University Partnerships Work Lessons from Successful Colaborations* mengatakan bahwa:

*“The primary focus of most industry-university collaborations is joint research. But many have an impact on teaching and learning that develops naturally out of the partnership. Professors join a project inside the company and reseacrhers agree to lecture, creating a fruitful ongoing*

*exchange that helps modernise curricula.*

Fokus utama kerjasama industri dan universitas adalah pada penelitian. Hal ini berpengaruh pada pengembangan proses pembelajaran. Profesor berkerjasama pada perusahaan, menciptakan perubahan kurikulum yang modern.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan makalah ini adalah:

Pengertian alumni sebagai *public private partnership* pada dunia pendidikan. Alumni merupakan lulusan atau produk suatu proses pembelajaran. Alumni dalam hal ini bisa orangtua, pengusaha, pegawai, guru, dll. Alumni dapat memberikan gagasan mengenai mutu pendidikan.

Peran alumni sebagai *public private partnership* pada pendidikan vokasi. Alumni sebagai informan dapat menjembatani sekolah dan dunia usaha/dunia industri. Industri membutuhkan sumber daya yang terdidik, handal, yang mampu menjawab segala tantangan. Sekolah merupakan produk yang menghasilkan lulusan yang berkompeten. Industri memiliki peran membantu pelaksanaan praktik kerja industri, pelatihan guru, dan rekrutmen tenaga kerja baru. Peran serta alumni merupakan keterlibatan yang nyata dalam suatu pendidikan. Peran tersebut bisa berupa memberikan gagasan, kritik membangun, kerjasama dan pelaksanaan pendidikan.

#### Daftar Pustaka

- Anggraeni. ND, Yoto, Basuki. (2015). Studi Tentang Peran serta Orang Tua dan Dunia Usaha/Industri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK I Negeri Singosari. Malang: Universitas Negeri malang
- Muhson. A, Wahyuni. D, Supriyanto dan Mulyani. E (2012). *Analisis Relevansi lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Okeye. KRE, Chijioko. OP. (2013). *Private-Public Partnership And Technical Vocational Education And Training (TVET) In A Developing Economy*. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter). Vol.2, No.10; May 2013.
- Patrions. HA, Osorio. FB, Guaqueta. J. (2009). *The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education*. Washington DC: The world Bank.
- The Science Businnes. (2012). *Making Industry-University Partnerships Work Lessons from Successful Colaborations*. London: Science Businnes.